



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 474/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan tata laksana serta membangun aparatur negara agar mampu mengembangkan misi, tugas dan fungsi serta perannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;

b. bahwa tim analisis jabatan dan analisis beban kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan analisis terhadap jabatan dan analisis beban kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. jumlah kebutuhan;
b. peta jabatan; dan
c. uraian jabatan.
- KETIGA** : Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam *google drive* dengan link: <https://drive.google.com/drive/folders/11CtCyE3-kXLu90YrPjBSeha3-jtLRVdz>.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 370/KEP/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat /Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 474/KEP/HK/2025**TANGGAL** : 2 Desember 2025**TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

No	Nama Jabatan	Jumlah Perhitungan		Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/ -	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
		Beban Kerja Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai				Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1840	1	0	0	-1	1		1.47	A (Sangat Baik)
2	Kepala Bagian Umum	1712	1	1	0	0			1.37	A (Sangat Baik)
3	Analis kebijakan Ahli Pertama	12330	9	0	0	-9	9		9.7	A (Sangat Baik)
4	Analis kebijakan Ahli Muda	2887	2	2	0	0			1.15	A (Sangat Baik)
5	Analis kebijakan Ahli Madya	1493	1	0	0	-1	1		1.19	A (Sangat Baik)
6	Arsiparis ahli Pertama	2928	2	2	0	0	0		1.17	A (Sangat Baik)
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	4345	3	3	0	0	0		1.16	A (Sangat Baik)
8	Pranata Komputer Ahli Muda	1467	1	0	0	-1	1		1.17	A (Sangat Baik)
9	Penelaah Teknis Kebijakan	1443	1	0	0	-1	1		1.15	A (Sangat Baik)
10	Pengadministrasi Perkantoran	2839	2	2	0	0			1.14	A (Sangat Baik)
11	Penata Layanan Operasional	12150	9	1	4	-4	4		8.55	A (Sangat Baik)
12	Operator Layanan Operasional	37813	28	11	17	0	0		2.63	A (Sangat Baik)
13	Pengelola Layanan Operasional	4052	3	3	0	0			1.02	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan		Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
			Jumlah Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai				Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Pengelola Umum Operasional	8103	6	2	4	0			3.16	A (Sangat Baik)	
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	1581	1	1	0	0			1.26	A (Sangat Baik)	
16	Penelaah Teknis Kebijakan	10836	8	7	0	-1	1	Orang	1.24	A (Sangat Baik)	
17	Pengadministrasi Perkantoran	29800	22	6	16	0	0	Orang	4.64	A (Sangat Baik)	
18	Pengolah Data Dan Informasi	1420	1	1	0	0			1.14	A (Sangat Baik)	
19	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	1707	1	1	0	0			1.37	A (Sangat Baik)	
20	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	4070	3	3	0	0	0	Orang	3.18	A (Sangat Baik)	
21	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama	4052	3	3	0	0	0	Orang	3.2	A (Sangat Baik)	
22	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1436	1	1	0	0			1.15	A (Sangat Baik)	
23	Pranatahubungan Masyarakat Ahli Madya	1496	1	0	0	-1	1	Orang	1.2	A (Sangat Baik)	
24	Penelaah Teknis Kebijakan	20534	15	9	0	-6	6	Orang	1.75	A (Sangat Baik)	
25	Pengadministrasi Perkantoran	28815	21	14	15	0	0	Orang	2.14	A (Sangat Baik)	
26	Pengolah Data Dan Informasi	4448	3	1	0	-2	2	Orang	3.56	A (Sangat Baik)	
27	Penata Keprotokolan	5502	4	1	0	-3	3	Orang	3.59	A (Sangat Baik)	
28	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	2700	2	2	0	0			1.05	A (Sangat Baik)	
29	Operator Layanan Operasional	1440	1	1	0	0			1.15	A (Sangat Baik)	
30	Pengelola Umum Operasional	1439	1	1	0	0			1.15	A (Sangat Baik)	

No	Nama Jabatan	Jumlah Perhitungan				Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
		Beban Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai						Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	Kepala Bagian Keuangan	1714	1	1	0	0			1.37	A (Sangat Baik)		
32	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1463	1	1	0	0			1.17	A (Sangat Baik)		
33	Perencana Ahli Pertama	3072	2	1	0	-1	1 Orang		2.46	A (Sangat Baik)		
36	Perencana Ahli Muda	1392	1	1	0	0			1.11	A (Sangat Baik)		
37	Perencana Ahli Madya	1476	1	0	0	-1	1 Orang		1.18	A (Sangat Baik)		
40	Penelaah Teknis Kebijakan	13500	10	8	0	-2	-2 Orang		5.45	A (Sangat Baik)		
41	Pengadministrasi Perkantoran	20260	15	4	11	0	0 Orang		3.46	A (Sangat Baik)		
Jumlah		259555	196	95	67	-34	34 Orang	0 Orang				

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 474 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 2 DESEMBER 2025

TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Paraf Koordinasi

Kepala Biro Organisasi	
Sekretaris DPRD	

Paraf hierarki

Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA